

Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna oleh BP3TKI provinsi Jawa Barat

Nuryah Asri Sjafirah¹, Dian Wardiana Sjuchro², Husnun Nasriah³, Evi Nursanti Rukmana⁴
^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja wanita yang muncul dan berkembang dewasa ini tentunya tidak dapat ditunda dan harus segera diatasi, dimulai dengan adanya komitmen dan kepedulian serta kesungguhan dari hati nurani yang paling dalam oleh semua pihak, yang didasari oleh pemikiran yang arif, bahwa “masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemanusiaan yang mempunyai hak berkehidupan layak dan aman. Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Tenaga kerja Indonesia (TKI) purna oleh BP3TKI Provinsi Jawa Barat”. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana usaha pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan TKI purna? 2) Bagaimana bentuk pemberdayaan untuk TKI purna di Jawa Barat? 3) Mengapa diperlukan pemberdayaan pada TKI Purna? Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan TKI purna oleh BP3TKI Jawa Barat ? Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberdayaan TKI purna oleh BP3TKI Jawa Barat. Untuk mendapat gambaran yang lengkap dan pemahaman yang lebih luas terhadap masalah penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum TKI purna di Kabupaten Garut masih rendah dalam wawasan, pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan kompetensi. Peran pengusaha besar di Kabupaten Garut pun perlu ditingkatkan lagi keterpaduannya melalui program CSR dan sumber permodalan lainnya. Program pemberdayaan belum bersinergi dan masih berjalan masing-masing sehingga hasilnya tidak sesuai dengan program dan saran yang diharapkan. Perlu upaya mensinkronkan Program pemberdayaan agar diperoleh hasil yang optimal.

Kata-kata Kunci: Pemberdayaan; TKI purna; BP3TKI Provinsi Jawa Barat; pelatihan; komunikasi

Empowerment of retired Indonesian Migrant Workers (TKI) by BP3TKI of West Java province

ABSTRACT

The complexity of manpower problems, especially women workers, which appear and develop today, of course, cannot be postponed but must be resolved immediately, with the initiation of commitment and concern and sincerity of the deepest conscience by all parties, based on wise thinking, that “the problem Manpower is a humanitarian problem that has the right to live a decent and safe life. This research is entitled “Empowerment of retired Indonesian Workers (TKI) by BP3TKI West Java Province”. The objectives of this study are: 1). How are the efforts of the parties involved in empowering full-fledged TKI? 2). What is the form of empowerment for retired TKI in West Java? 3) Why is empowerment needed for retired TKI? What are the obstacles and efforts to overcome obstacles in the empowerment of retired Indonesian migrant workers by West Java BP3TKI? This study aims to see how the empowerment of retired Indonesian migrant workers by BP3TKI West Java. To get a complete picture and broader understanding of the research problem, this study uses qualitative research methods. In general, full-time TKI in Garut Regency is still low in insight, knowledge, education, skills and competence. The role of big entrepreneurs in Garut Regency needs to be further integrated through CSR programs and other sources of capital. Empowerment programs have not synergized and are still running respectively, so the results are not in accordance with the expected recommendations. Efforts are needed to synchronize the empowerment program in order to obtain optimal results.

Keywords: Empowerment; retired Indonesian migrant workers; BP3TKI West Java province; training; communication

Korespondensi: Evi Nursanti Rukmana, M.I.Kom. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Sumedang, 45362. Email: evi.nursanti.rukmana@unpad.ac.id

Submitted: December 2020, **Accepted:** October 2021, **Published:** October 2021

ISSN: 2548-3242 (printed), ISSN: 2549-0079 (online). Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi>

PENDAHULUAN

Penanganan terhadap kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang muncul dan berkembang dewasa ini tentunya tidak dapat ditunda dan harus segera diatasi. Dimulai dengan adanya perhatian dan kepedulian serta kesungguhan dari hati nurani yang paling dalam dari semua pihak terkait, serta didasari oleh pemikiran yang arif, bahwa “masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemanusiaan yang mempunyai hak berkehidupan yang layak dan aman.” Hal ini mengingat banyak berbagai macam kasus yang terjadi pada TKI di setiap tahunnya yang lalu lalang diberitakan media.

TKI merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah minyak dan gas (migas) bagi Negara Indonesia sehingga mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Hanya saja perlakuan buruk dan tidak manusiawi masih sangat sering dialami oleh para TKI di negara tempat mereka bekerja. Pergi berharap mendapat kesejahteraan, sayang yang sering didapat ternyata justru penderitaan. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya, mulai dari sebab yang bersumber dari diri TKI sendiri, sistem perekrutan, pengiriman dan pemulangan, ataupun karena agen penyalur yang tidak bertanggung jawab hingga perlindungan hukumnya tidak jelas,

bahkan pemberdayaan pada kelompok TKI purna.

Pemberdayaan pada kelompok TKI purna sering kali dinyatakan dalam berbagai kesempatan dilakukan untuk berbagai tujuan. Salah satunya bahwa pemberdayaan TKI adalah cara jitu menangani persoalan TKI. Namun hal ini tidak sesederhana itu, persoalan TKI yang dimaksud sangatlah kompleks sehingga butuh penanganan yang tidak sekadar “sudah ada program” penanganan, melainkan butuh kegigihan dan tekad dari setiap pihak untuk mengatasinya. Pada akhirnya program pemberdayaan pun harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan tujuan yang jelas.

Akan tetapi dari pernyataan tersebut, timbul pertanyaan, di antaranya pemberdayaan yang bagaimana yang dapat mengatasi persoalan TKI, yang bentuknya apa, siapa yang akan melakukannya dan siapa sasaran utamanya, kapan, di mana, dan bagaimana keberlanjutannya? Merujuk pada pertanyaan, sebenarnya apa tujuan pemberdayaan TKI purna ini? Apakah dimaksudkan agar TKI tidak kembali lagi ke tempat kerja di luar negeri, atau justru sebaliknya, membekali TKI dengan keterampilan agar mereka kembali bekerja di luar negeri? Ataupun pemberdayaan ini untuk meningkatkan kualitas TKI agar keberadaannya terlindungi? Atau ternyata hanya sekadar untuk meningkatkan kualifikasi dan jumlah pendapatan

yang diperoleh? Apakah pemberdayaan ini dilakukan untuk mengalihkan jenis pekerjaan TKI ke sektor formal atau kedua-duanya?

Pemberdayaan (*empowerment*) TKI adalah suatu kebutuhan dan diyakini kemampuannya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi TKI. Idealnya, semua jenis dan fokus pemberdayaan diarahkan kepada TKI yang hendak ke luar negeri atau yang sudah pulang kampung, baik yang ingin kembali ke luar negeri atau yang ingin merintis usaha di dalam negeri setelah mendapatkan sejumlah uang remitansi hasil jerih payahnya. Semua kemungkinan tersebut seharusnya dapat difasilitasi *stakeholders* terkait.

Pemberdayaan TKI bukan hanya kegiatan prosedural yang menekankan aspek kelengkapan dokumen dan persyaratan legal atau formal, tetapi lebih luas dan jauh lebih penting daripada aspek teknis tersebut. Sayangnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri cenderung diarahkan untuk melakukan pemberdayaan dari sisi prosedural formal. Kecenderungan tersebut dapat dibaca dari pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang dapat dikatakan tidak mengatur esensi persoalan pemberdayaan sebagaimana yang banyak dikemukakan dalam berbagai literatur dan konsep pemberdayaan. Padahal dengan jelas

dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah proses di mana aspek prosedural formal adalah salah satu bagian di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya aspek prosedural formal hanya menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka proses menangani beragam persoalan TKI di luar negeri.

Pemberdayaan dalam arti luas tidak hanya berupa proses *empowering* tetapi juga proses *enabling* yang tidak hanya memperkuat dari sisi politik dan hukum, tetapi juga memungkinkan mereka yang hendak diberdayakan dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Secara harfiah saja pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan (Pusat Bahasa, 2019), yang berarti di dalamnya jelas terdapat proses pemberian kapasitas terhadap subjek, dalam hal ini adalah TKI purna. Untuk melakukan proses tersebut, tentu diperlukan komunikasi yang efektif sehingga komunikasi menjadi ujung tombak dari keberhasilan pemberdayaan TKI purna.

Upaya pemberdayaan ini dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Barat, Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu (BPTKIT) Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait lain yang menyelenggarakan pemberdayaan pada

kalangan TKI purna. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu Program Pemberdayaan dan Edukasi Kewirausahaan TKI Purna pertama dilaksanakan di Jawa Barat pada 8 – 9 dan 16 – 17 April 2015. Kegiatan tersebut digelar di dua kecamatan di Kabupaten Garut yaitu Kecamatan Cisurupan dan Kecamatan Bayongbong. Bentuk kegiatan berupa pengenalan jamur tiram, perencanaan konstruksi tempat media tanam, dan budidaya jamur tiram, serta ditambah pula dengan pelatihan manajemen keuangan. Kegiatan pelatihan perdana ini diadakan selama dua hari di Aula Kantor Desa Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, acara ini menggunakan konsep pemberdayaan secara terintegrasi dengan menggandeng beberapa *stakeholders* seperti lembaga keuangan perbankan (BRI, BNI, serta BJB) dan mitra profesional bisnis dan Industri.

Komunikasi tentu menjadi ujung tombak keberhasilan pemberdayaan pada kalangan TKI purna. Apabila komunikasi tidak berjalan secara efektif tentu koordinasi yang dilakukan akan mengalami hambatan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kesimpangsiuran konsep: pemberdayaan yang bagaimana, bentuknya yang seperti apa, tujuan pemberdayaan ini untuk apa? Apakah dimaksudkan agar TKI tidak kembali lagi ke tempat kerja di luar negeri, atau justru sebaliknya, yakni mendorong TKI untuk

kembali ke luar negeri. Kemungkinan lainnya adalah pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas TKI agar keberadaannya terlindungi atau sekadar untuk meningkatkan kualifikasi dan jumlah pendapatan yang diperoleh. Pertanyaan lain seperti, apakah pemberdayaan dilakukan untuk mengalihkan jenis pekerjaan TKI ke sektor formal atau kedua-duanya, ini juga tidak terhindarkan. Dari berbagai pertanyaan tersebut, seharusnya dapat diluruskan melalui komunikasi yang tepat dan pemaparan tujuan yang jelas.

Berdasarkan gambaran masalah yang dipaparkan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah, “Untuk memahami bagaimana pemberdayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) purna oleh BP3TKI Provinsi Jawa Barat”. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat diidentifikasi dengan beberapa pertanyaan berikut: bagaimana usaha pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan TKI purna?, bagaimana bentuk pemberdayaan untuk TKI purna di Jawa Barat?, mengapa diperlukan pemberdayaan pada TKI purna?, dan bagaimana hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan TKI purna oleh BP3TKI Jawa Barat?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberdayaan TKI purna oleh

BP3TKI Jawa Barat. Untuk mendapat gambaran yang lengkap dan pemahaman yang lebih luas terhadap masalah penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Unit analisis dari penelitian ini ada tiga, yaitu; (1) BP3TKI Provinsi Jawa Barat, (2) BNP2TKI Provinsi Jawa Barat, (3) Pihak dari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, dan (4) TKI purna.

Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pemberdayaan TKI Purna di Provinsi Jawa Barat, dipilih teknik *purposive sampling* dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak BP3TKI dan BPTKIT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, untuk menentukan kelompok pemberdayaan yang akan dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut. Pertama, wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara telah dilakukan secara mendalam dengan pihak BP3TKI, BPTKIT Disnaker Provinsi Jawa Barat, Disnaker Kota/Kabupaten, Aparat Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dan TKI purna di Jawa Barat yang dipilih secara acak atas pertimbangan tertentu. Kedua, yaitu tahap observasi. Tahap observasi atau pengamatan langsung situasi dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan mengenai pemberdayaan TKI purna.

Tahap penelitian ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder tentang pemberdayaan TKI purna. Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan berbagai konsep dan teori yang memberi pemahaman tentang pemberdayaan TKI purna. Selanjutnya tahap keempat, yaitu *focus group discussion* (FGD). FGD akan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak tertentu guna mendiskusikan hasil temuan secara komprehensif tentang permasalahan yang digali dalam penelitian ini sekaligus melakukan “triangulasi data” terhadap temuan-temuan di lapangan selama penelitian ini berlangsung.

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian, maka dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif. Analisis dilakukan secara deskriptif terkait dengan aspek-aspek yang dianalisis (unit analisis). Analisis juga dilakukan dengan merujuk pada identifikasi masalah yang ada serta tujuan penelitian yang telah ditentukan. Selain hasil paparan deskriptif analisis juga dilakukan dengan cara memetakan berbagai aspek terkait guna melakukan penyusunan laporan mengenai pemberdayaan TKI purna di Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003), yaitu sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

Tahap kedua menurut Bungin yaitu reduksi data. Reduksi data ini diartikan sebagai proses pemilihan dan pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan

data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Ketiga yaitu display data. Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

Keempat, verifikasi dan penegasan kesimpulan yang merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka

setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di BP3TKI Jawa Barat, BPTKIT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kota/ Kabupaten, kelompok TKI purna yang ada di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Jawa Barat yang ditentukan secara *purposive* (bertujuan). Waktu penelitian dilaksanakan selama maksimal lima bulan, termasuk persiapan dan penulisan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dalam memberdayakan tenaga kerja Indonesia yang sudah pernah bekerja di luar negeri, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI yang telah berganti nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, mengadakan berbagai program untuk membantu para TKI (Witono, 2021). Salah satu programnya adalah dengan mengadakan suatu pelatihan yang sifatnya jangka panjang bagi para TKI purna yang disebut dengan Pemberdayaan

dan Edukasi Kewirausahaan TKI Purna dan Keluarganya. Berdasarkan penuturan Arini Rahyuwati, Direktur Pemberdayaan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI pada saat diwawancarai Media Okezone (Setyadi, 2015), menyatakan bahwa,

“Tujuan utama pelatihan kewirausahaan ini supaya TKI/TKI purna dan keluarga TKI dapat mengelola keuangan dari remitansi untuk pengembangan usaha-usaha produktif bagi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.”

Berangkat dari tujuan utama tersebut, maka para TKI purna akan dilatih sesuai minat dan keinginannya serta potensi di daerahnya masing-masing. Program ini direncanakan akan dikembangkan di 11 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, NTB, Bali, Banten, dan Lampung. Hal tersebut diungkapkan juga oleh Arini Rahyuwati (Setyadi, 2015). Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai perusahaan perbankan dan mitra lainnya seperti inspirator dan motivator pada pelatihan ini. Program ini dimulai dan telah diselenggarakan oleh BP3TKI dan BPTKIT Provinsi Jawa Barat pada 2015 lalu di Kabupaten Garut.

Narasumber pada kegiatan edukasi kewirausahaan pada program ini terdiri dari BP3TKI, BPTKIT sebagai bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian

Kabupaten Garut, Tenaga profesional, inspirator, dan motivator. Materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi kewirausahaan akan meliputi pemberdayaan TKI, pola berusaha, kredit usaha kecil untuk TKI purna, mutu kualitas produk, dan pengembangan usaha. Materi tersebut diangkat pada pelatihan untuk TKI purna dengan pertimbangan potensi dan juga minat serta kemampuan para TKI purna.

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan untuk menjadi wirasusaha yang berorientasi pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi kreatif, serta kuliner. Berdasarkan konsep, pemberdayaan ini melakukan inkubasi dan terdiri dari 5 (lima) tahap. Di antaranya TKI purna dilatih, diajak, didampingi dan dicarikan penjamin dari pembiayaan (produksi pasca pelatihan) untuk memproduksi dan melakukan penjualan hasil produksinya.

Program Pemberdayaan dan Edukasi Kewirausahaan TKI Purna dan Keluarganya pertama kali diselenggarakan pada 8 – 9 dan 16 – 17 April 2015 di Kabupaten Garut. Program Pemberdayaan dan Edukasi Kewirausahaan TKI Purna dan Keluarganya ini digelar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Cisarupan dan Kecamatan Bayongbong, Garut. Kegiatan yang dilakukan berupa pengenalan jamur tiram, perencanaan konstruksi tempat media tanam, dan budidaya jamur tiram, ditambah dengan pelatihan manajemen keuangan.

Kegiatan pelatihan untuk TKI purna ini dilaksanakan selama dua hari bertempat di Aula Kantor Desa Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Acara ini menggunakan konsep pemberdayaan secara terintegrasi dengan menggandeng beberapa *stakeholders* seperti lembaga keuangan perbankan dan mitra profesional bisnis dan industri. Mitra perusahaan perbankan yang bersedia memberikan pelatihan di antaranya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), dan Bank Jawa Barat (BJB). Kegiatan dibuka oleh Kepala BP3TKI Bandung, Delta, dan Amir (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut). Pada kegiatan ini sebanyak 50 orang hadir sebagai peserta pelatihan yang merupakan TKI purna yang pernah bekerja di Timur Tengah. Desa Cipaganti Kecamatan Cisarupan yang merupakan kantong basis TKI Purna yang pernah bekerja di Timur Tengah ini menjadi salah satu fokus perhatian *stakeholders* dalam menyelenggarakan program pemberdayaan. Terkait dengan dipilihnya bentuk pelatihan budidaya jamur tiram tidak lain karena dari hasil analisis BNP2TKI dan BP3TKI tentang potensi produk lokal serta produksi dan pemasarannya, ternyata tidak begitu sulit. Ini sangat cocok dengan potensi daerahnya. Ditambah lagi dengan menggandeng mitra lokal profesional yang tahu cara produksi

dan pasar untuk memberikan pelatihan pada para TKI Purna. Dengan mitra lokal diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para peserta pelatihan dalam berkomunikasi.

Komunikasi dalam kegiatan pelatihan ini sangat krusial karena dapat memberikan pengaruh kuat terhadap peserta. Baik itu pengaruh yang berdampak baik maupun yang berdampak buruk. Selain itu peran konsultatif BNP2TKI juga harus didasari dengan komunikasi yang baik dan harus diimplementasikan dengan baik (Hikmah et al., 2019). Perbedaan pemahaman, pola pikir masyarakat, stigma masyarakat, akan berbeda pada setiap daerahnya sehingga hal ini harus selalu diingat. Pendekatan atau *approaching* yang dilakukan oleh *stakeholders* baiknya selalu mempertimbangkan sisi kearifan lokal yang mana akan sangat membantu menentukan apakah kegiatan akan berhasil dilakukan dan mampu memberikan manfaat berjangka panjang seperti yang ditujukan, atau justru sebaliknya. Dengan demikian seluruh pihak yang terlibat sebaiknya melakukan riset dan pengenalan terlebih dahulu dengan masyarakat yang akan menjadi peserta pelatihan.

Rangkaian pelatihan ini sendiri meliputi pengenalan jamur tiram, perencanaan konstruksi tempat dan media tanam jamur, serta budidaya jamur. Materi tersebut disampaikan oleh Nurfaiz Almubarak serta Moch. Sofyan Tsauri dari

PT. Kowina Supa Rancage. Menurut Nurfaiz, kebutuhan pasar di Jawa Barat akan jamur cukup banyak. Namun, jumlah produksinya masih belum mencukupi kebutuhan dan permintaan.

Materi-materi tersebut diberikan dengan tujuan agar para TKI purna dapat mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya. Materi pengenalan jamur tiram, diberikan agar peserta pelatihan dapat mengetahui seperti apa bentuk jamur tiram dan seperti apa karakteristiknya sehingga bisa menstimulus peserta untuk mendapatkan ide dan gagasan untuk berwirausaha dengan produksi jamur. Dengan mengenal jamur tiram, peserta juga bisa mendapat bayangan, produk apa saja yang bisa mereka produksi dengan jamur tiram. Melalui pengenalan ini visi kedepannya, agar para TKI purna bisa memahami dengan baik jamur yang akan mereka jadikan basis usaha sehingga mereka di kemudian hari dapat memasarkannya dengan baik. Sebagai contoh, jika mereka mengetahui kandungan gizi jamur tiram di antaranya karbohidrat dan protein (Nasution, 2016), maka mereka dapat memasarkan produk dengan slogan-slogan pemenuhan gizi dan sejenisnya.

Materi perencanaan konstruksi tempat dan media penanaman jamur dapat memberikan pengetahuan bagi para peserta apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk menanam jamur. Jika terdapat bahan-bahan substitusi yang bisa

digunakan kembali di rumah, mereka dapat mengkreasikannya dan meminimalisir modal yang digunakan. Pemberian materi tentang budidaya jamur juga bisa memberikan peserta pengetahuan bagaimana membudidayakan jamur dengan baik dan benar sehingga dapat memperkecil risiko rugi karena tanaman mati dan tidak dapat dipanen. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dengan produk lokal bisa berhasil dilakukan para TKI di Garut seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Subang, Jawa Barat (Hanidah et al., 2018).

Selain itu, para peserta pelatihan juga diberikan pembekalan mengenai manajemen keuangan yang disampaikan oleh mitra dari BRI, BNI, dan BJB, pembekalan dalam manajemen keuangan menjadi sangat penting pada masyarakat terutama TKI purna mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat masih terbilang rendah (Akmal & Saputra, 2016). Pengetahuan mengenai mutu kualitas produk juga dibagikan pada kegiatan ini. Pengetahuan tersebut bisa menjadi referensi bagi para peserta dalam memproduksi produk yang bermutu. Dari sini pulalah para peserta bisa melakukan usahanya dengan baik dan dengan produk yang terjamin. Tanpa disadari materi mutu kualitas produk adalah salah satu hal yang krusial dalam menjalankan sebuah usaha. Hal ini karena nantinya yang akan menjadi indikator utama bagi para pelaku usaha khususnya para

TKI purna dalam mendapatkan legalitas atas usahanya adalah melalui mutu produknya.

Legalitas yang bisa didapat bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di mana para peserta pelatihan termasuk ke dalam kelompok klasifikasinya, di antaranya adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Hak Merek, Sertifikasi Halal, Izin Edar BPOM, Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), dan bentuk badan hukum, merupakan legalitas yang bisa diajukan dimiliki oleh pelaku usaha kecil. Dengan adanya legalisasi terutama untuk Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM pada produk makanan, usaha yang dilakukan akan lebih terpercaya dan terjamin di mata konsumen karena pada proses sertifikasinya telah dilakukan berbagai pemeriksaan terhadap produk. Meski tidak dirasakan secara langsung, nyatanya materi mutu kualitas produk bisa menjadi modal *intangible* yang akan berguna di kemudian hari. Pelatihan dengan materi-materi tersebut merupakan upaya yang baik dari BP3TKI dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para TKI purna sehingga pemberdayaan TKI purna bisa terwujud.

Dari pernyataan kalangan profesional seperti pemateri Sofyan yang sebelumnya telah disebutkan, dapat kita lihat bahwa sebetulnya potensi untuk melakukan kegiatan wirausaha basis pertanian jamur akan memberikan peluang

keuntungan yang cukup besar bagi para TKI purna. Tentunya hal itu bisa didapat dengan kesungguhan dan konsistensi yang terus dijaga. Keberlanjutan dan konsistensi berwirausaha menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan para pemateri yang hadir.

Pendayagunaan TKI purna juga sejalan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha baru dari para generasi muda. Hal itu juga sekaligus sebagai tindak lanjut rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2015 untuk memulangkan sebanyak 1,8 juta WNI *Overstayers* (tinggal lebih lama dari izin yang berlaku) sehingga dapat mencegah salah satu penyebab TKI bermasalah di negara tempatnya bekerja. Program Pemberdayaan dan Edukasi TKI Purna ini dapat seiring dan sejalan dengan rencana Presiden tersebut. Dengan program tersebut TKI purna dilatih untuk menjadi wirausaha baru sehingga mereka tidak tergiur untuk kembali bekerja di luar negeri.

Motivasi yang biasanya ditemui para TKI purna yang akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke luar negeri salah satunya adalah karena pendapatan di Indonesia tidak sebesar saat ia bekerja di luar negeri. Gaya hidup dan utang piutang juga menjadi faktor lain yang ikut mendorongnya. Program yang kali ini BP3TKI tidak hanya fokus pada individunya saja, melainkan juga pada keluarganya seharusnya

bisa dan mampu memberikan motivasi yang kuat terhadap para TKI purna untuk tidak kembali lagi bekerja di luar negeri.

Pemberdayaan TKI purna sangat dibutuhkan apalagi setelah sempat dilakukan moratorium untuk pengiriman tenaga kerja ke negara-negara di Timur Tengah. Moratorium yang dilakukan sejak tahun 2015 ini ditandai dengan disahkannya Kepmen No. 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah, menunjukkan bahwa tidak selamanya saat tenaga kerja berkeinginan untuk kembali bekerja khususnya ke kawasan timur tengah, terutama Arab Saudi dapat begitu saja kembali dengan mudah (Syahmat & Jumaah, 2020). Kemudian pada 2018 moratorium tersebut menemui titik terang dengan dikeluarkannya Kepmen Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018. Meski begitu pemberdayaan TKI purna tetap harus dilakukan terutama untuk tenaga kerja yang bertujuan ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.

Sementara itu sebanyak 80% TKI khususnya dari Jawa Barat adalah TKI yang pernah bekerja di timur tengah sehingga perlu adanya bimbingan dan pelatihan bagi TKI yang pulang dan tidak lagi bekerja ke timur tengah. TKI yang telah kembali ke kampung halamannya perlu untuk melanjutkan kehidupannya. Namun

memang berbagai tantangan harus mereka hadapi untuk bisa mencari nafkah di negara sendiri. Jika mereka tidak diberdayakan, tidak dibekali untuk melalui tantangan itu, maka justru akan menambah dampak negatif lain seperti naiknya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia (Astuti et al., 2019).

Ini juga yang harus menjadi perhatian setiap pihak yang terlibat karena pada akhirnya bukan hanya akan memberikan kesulitan pada TKI purna saja, tetapi juga bagi banyak pihak. Pemberdayaan TKI purna juga dapat beranjak dari pelatihan yang didasarkan pada minat mereka yang ternyata minatnya pada sektor formal cukup tinggi dan bahkan banyak yang ingin mendapatkan sertifikasi (SE, 2019).

Selain itu kesejahteraan kehidupan masyarakat semakin berkurang karena tidak adanya sumber dana yang menyokong kehidupannya. Tujuan utama kegiatan kewirausahaan ini supaya TKI dan keluarga TKI dapat mengelola keuangan untuk pengembangan usaha-usaha produktif bagi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Ini bisa membuat uang yang telah didapatkan juga dapat terus berputar dan menghasilkan sehingga arus uang yang telah mereka hasilkan selama bekerja di luar negeri akan jelas arahnya.

Hambatan yang terjadi dalam menjalankan program pemberdayaan TKI salah satunya karena masih sporadis dan belum terintegrasinya

berbagai program yang hendak dilaksanakan. Instansi pemerintah memiliki program pemberdayaan, selain itu perbankan dan pelaku usaha juga memiliki program yang serupa. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi bingung program mana yang seharusnya mereka ikuti, walau sebenarnya hasilnya sama saja, TKI tetap berdaya guna, namun data dan pengawasannya masih kurang rapi. Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan ini salah satunya dengan membuat sistem yang jelas dan terintegrasi antar *stakeholders* terkait. Untuk membuat sistem yang jelas dan terintegrasi dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi kebingungan dan pilihan prioritas bagi para TKI purna. Ini dapat mengefisienkan waktu bagi para TKI purna dalam memutuskan mengikuti program. Meski kata koordinasi dan komunikasi untuk mengatasi hambatan ini terdengar mudah, namun praktik saat di lapangan dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang mumpuni agar dapat berjalan selaras. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan akan banyak kepentingan yang harus diakomodasi.

Hambatan selanjutnya juga terjadi pada sektor modal, ketika TKI telah pulang dari luar negeri mereka akan mendirikan usaha dengan hanya bermodalkan uang yang mereka bawa dari luar negeri tempat mereka bekerja. Apabila berhasil mengembangkan modal yang ada maka

TKI tersebut memang bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tidak setiap usaha sekali dilakukan langsung menemui kesuksesan. Pada kenyataannya saat usaha yang dilakukannya gagal, TKI sulit untuk mendapatkan modal tambahan dari pemerintah. Solusi dari permasalahan ini biasanya pihak desa akan mendata TKI yang bermasalah dengan modal, dan nanti akan memberikan bantuan dana dari dana PNPM Mandiri yang masuk ke desa-desa. Per TKI bisa mendapatkan dana sebesar 1,5 juta, tapi itu masih dianggap kurang. Usaha lainnya adalah dengan membantu pengurusan pinjaman ke bank, tapi masih sulit untuk TKI purna mendapatkan pinjaman uang dari bank karena regulasi bank seperti yang sudah diketahui harus memiliki jaminan atas pinjaman, jika dapat pun, jumlah pinjaman yang diterima tidak terlalu besar. Dalam hal ini dengan menggandeng perusahaan perbankan seperti BRI, BNI, dan BJB sebagai mitra seharusnya bisa membawa angin segar bagi para TKI purna untuk mendapat suntikan modal yang cukup.

Sebetulnya banyak jenis program bantuan pemerintah yang bisa diklaim oleh para pengusaha mikro yang salah satunya berlatar belakang TKI purna. Seperti di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil. Bantuan tersebut di antaranya adalah bantuan langsung untuk

para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara tunai atau dikenal juga sebagai Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp. 2.400.000. Bantuan tersebut hanya mensyaratkan bahwa penerima bukanlah seorang yang pernah dan/atau sedang menerima pinjaman biaya dari perbankan (*unbankable*). Selain itu, di masa pandemi Covid 19 pada 2021 ini, pemerintah juga semakin menggencarkan bantuan langsung tunai bagi pelaku usaha mikro (Savitri et al., 2020). Hal ini tentu memudahkan para TKI purna dalam mendapatkan sedikit tambahan modal yang hendak atau sedang melakukan usaha, tetapi tidak bisa mendapat pinjaman dari bank. Tentu ini dapat segera dimanfaatkan dan menjadi salah satu cara mengatasi hambatan modal.

Hambatan selanjutnya adalah dalam bidang pemasaran. Masalah ini sebagai contoh dirasakan oleh Ibu Tayibatun di Desa Salakurai, Garut. Beliau membuat penganan ringan berupa coklat. Saat coklat sudah terproduksi masalah selanjutnya adalah pemasaran. Ibu Tayibatun terkendala dengan akomodasi, dia hanya bisa menjual coklatnya di warung-warung kecil di desanya. Tapi tidak bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk hambatan ini seharusnya dapat segera diatasi mengingat program pemberdayaan TKI purna telah dilaksanakan. Materi yang diberikan seharusnya sudah

meliputi pemasaran produk sehingga dari situ pulalah para pelaku usaha bisa mendapat wawasan mengenai bagaimana caranya memasarkan produk mereka secara lebih luas. Bahkan seharusnya para peserta pelatihan bisa mendapatkan jejaring (*channel*) yang bisa diajak bekerja sama dalam hal pemasaran, sehingga Ibu Tayibatun dan orang lain yang memiliki kendala yang serupa, dapat segera memasarkan produk usahanya di pangsa pasar yang lebih luas. Sayangnya materi ini pada kegiatan pelatihan di Kabupaten Garut belum disampaikan secara komprehensif.

Fokus dari penelitian ini yang mana dilakukan untuk mengetahui sebenarnya pemberdayaan TKI purna yang seperti apa yang dilakukan BP3TKI dan juga untuk mengetahui bentuk serta tujuannya, telah menunjukkan bahwa memang ternyata pemberdayaan yang dilakukan adalah berbentuk pelatihan dengan tujuan menyejahterakan para TKI purna dan keluarganya. Akan tetapi, perlu disadari bahwa, bagaimana bisa dengan waktu dua hari pelatihan seseorang dapat langsung mencapai kesejahteraan yang sifatnya harus dilihat dan diamati dalam jangka panjang. Seperti halnya pelatihan yang juga dilakukan di Sukabumi yang memberikan materi fotografi dan pengelolaan acara yang diberikan dalam waktu satu hari, nyatanya untuk mengetahui berhasil tidaknya para TKI purna menyerap materi harus dilihat

dalam beberapa waktu ke depan (Purwana, 2016). Butuh sinergi serta konsistensi berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan dan untuk menyatakan bahwa para TKI purna yang sudah mengikuti pelatihan telah sejahtera bersama keluarganya.

Sementara yang kita ketahui bahwa kesejahteraan tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang. Indikator kesejahteraan (*welfare indicators*) harus ditinjau dari berbagai dimensi, seperti dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial secara subjektif dan objektif, yang mana sudut pandang menjadi hal yang utama diperhatikan (Setiawan, 2019). Ini juga yang harus menjadi konsentrasi dari BP3TKI dalam upayanya memberdayakan para TKI purna. Dalam prosesnya, akan selalu dan pasti melibatkan komunikasi yang dituntut terjalin dengan baik dan efektif sehingga tidak akan terjadi selisih paham yang tidak diinginkan. Koordinasi antara para *stakeholder* dengan *stakeholder*, antara *stakeholder* dengan TKI/TKI purna, dan *stakeholder* dengan mitra akan menjadi ruang utama untuk dapat menjalin komunikasi yang rutin dan berkelanjutan. Ini akan menjadi salah satu bahan jaminan bagi BP3TKI ketika nanti akan menyatakan bahwa tujuan dari Program Pemberdayaan dan Edukasi TKI Purna dan Keluarganya telah tercapai sehingga tidak ada yang menyangsikan hasilnya.

Berikut ini adalah beberapa aspek

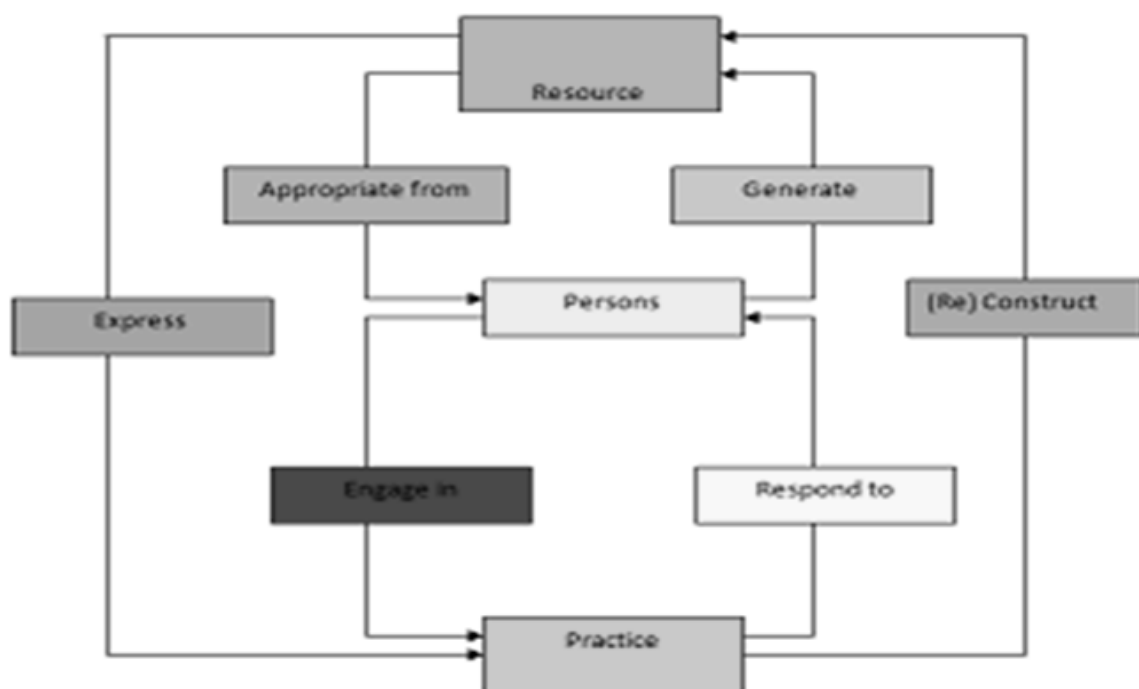
dari pengalaman individu dalam Program Pemberdayaan TKI Purna di Jawa Barat, yang dapat dilihat dari perspektif bagaimana pengalaman itu dibentuk dan digunakan dalam teori konstruksi sosial. Pada gambar 1 dapat dilihat bagaimana alur dan prosesnya.

Sesuai gambar 1, *resources* meliputi ide-ide, nilai, cerita-cerita, simbol, makna, lembaga, bentuk kegiatan dan sebagainya yang digunakan untuk membangun realitas pemberdayaan TKI Purna. Semuanya dibagikan dengan orang lain dan dikonstruksi secara bersama melalui interaksi di dalam masyarakat. *Practices*, istilah yang ada di bawah gambar, mendesain apa yang dilakukan dan ditampilkan. *Practices* maksudnya perilaku, dan bentuk ekspresi dari pihak-pihak yang terlibat dalam upaya

pemberdayaan TKI purna. Dalam penelitian ini berarti perilaku dan bentuk ekspresi dari TKI purna, BP3TKI, BPTKIT, dinas pertanian, dan mitra lain seperti perusahaan perbankan serta mitra pengusaha lokal.

Pada gambar tersebut *resources* dan *practices* terhubung secara erat dan benar-benar tidak dapat dipisahkan. *Resources* dikonstruksi dalam *practice*, dan *practice* dibentuk melalui *resources*. *Resources* dan *practices* dihubungkan melalui individu, yang mengacu pada interaksi antarindividu dalam masyarakat. Saat individu saling berinteraksi, mereka mengonstruksi *resources* dan *practices* baru.

Mengacu pada teori Konstruksi Realitas oleh Berger & Luckmann (1990), hakikat



Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2019

Gambar 1 Aspek pengalaman individu Program Pemberdayaan TKI Purna di Jawa Barat

pemberdayaan tersebut adalah suatu produk aktivitas yang kreatif dari manusia dan dibentuk secara bersama-sama oleh pihak yang terlibat pada kegiatan edukasi kewirausahaan ini yang terdiri dari BP3TKI Jawa Barat, BPTKIT sebagai bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, tenaga profesional, inspirator, dan motivator. Materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi kewirausahaan ini, yang meliputi pemberdayaan TKI, pola berusaha, kredit usaha kecil untuk TKI purna, mutu kualitas produk dan pengembangan usaha yang seharusnya diperoleh dari hasil riset awal dari peserta pelatihan (TKI Purna) sehingga pelatihan tersebut akan menjadi kebutuhan dari peserta pelatihan.

Dengan berbagai keuntungan yang bisa didapat dari program pemberdayaan TKI purna, seharusnya cukup untuk menggugah para TKI purna untuk terlibat sebagai peserta. Penyampaian maksud dan tujuan yang baik harus dilakukan secara hati-hati dan seksama. Hati-hati yang dimaksud di sini adalah ketika hendak mengajak para peserta untuk bergabung, tidak ada salahnya untuk menggunakan cara mereka biasa berkomunikasi dengan mengenali budayanya. Awal komunikasi yang dijalin akan meninggalkan kesan yang kuat. Keterpaduan dan kekompakan para pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan program

pemberdayaan purna TKI harus terus dibina. Ini juga dapat mencegah salah satu hambatan yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa peserta sering mengalami kebingungan karena banyaknya program serupa. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan baik.

Apabila para *stakeholders* program pemberdayaan ini semua “satu suara” maka akan meyakinkan para TKI purna untuk memberdayakan dirinya. Konsistensi yang ditunjukkan seluruh pihak terkait juga akan menjadi sesuatu yang bernilai bagi para TKI purna. Tujuan utama pemberdayaan yang tak lain adalah kesejahteraan TKI purna dan keluarganya harus ditekankan dan diingat oleh setiap lapisan pihak sehingga tujuan ini bisa dicapai. Tentu bukan hanya pada saat kegiatan diselenggarakan saja melainkan juga pasca kegiatan sehingga program bersifat kesinambungan.

Perlu adanya kajian dan identifikasi program pemberdayaan TKI purna secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan kata lain dengan melakukan manajemen yang baik untuk program ini. Perencanaan dapat dilakukan dan didokumentasikan dengan membuat penganggaran, pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan didokumentasikan pada media tulisan yaitu dengan notula dan/

atau berita acara, melalui foto/video, dan lain-lain. Sementara untuk evaluasi dapat dilakukan dengan mengadakan laporan pertanggungjawaban dan membandingkan hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

Pengamatan kemajuan usaha para TKI purna juga sebaiknya dilakukan. Misalnya dengan komunikasi instruksional yang dilakukan berkesinambungan sebagai upaya evaluasi akan memberikan alternatif solusi terhadap hambatan yang ditemui para TKI purna saat melakukan usahanya (Yuniar et al., 2021). Ini juga akan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekadar program dari pemerintah tetapi juga bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap masyarakat TKI purna.

Jika tahapan tersebut dilakukan dengan terus mendokumentasikan dan mengarsipkannya, maka hasil program tersebut dapat dijadikan rujukan untuk program berikutnya atau dengan kata lain menjadi umpan balik untuk program berikutnya yang akan dilaksanakan. Dokumennya juga akan lebih terarah dan sistematis sehingga memudahkan jika hendak dilakukan pengintegrasian data program pemberdayaan TKI purna oleh BP3TKI dengan pihak terkait lainnya.

Dalam proses pengintegrasian program pemberdayaan setiap pihak harus mempertimbangkan potensi kearifan lokal.

Potensi kearifan lokal akan memberikan peluang variasi usaha yang pasti akan memiliki kekhasan masing-masing serta yang merupakan sesuatu yang masyarakat terampil pada bidangnya (Katiah et al., 2019). Pertimbangan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga TKI purna. Dengan cara seperti itu pulalah peserta pelatihan (TKI purna) akan merasa dirinya dilibatkan dan tidak merasa dipaksakan untuk mengikuti bentuk pelatihan yang ditentukan oleh penyelenggara program pemberdayaan TKI purna.

SIMPULAN

Pihak yang terlibat pada kegiatan edukasi kewirausahaan ini terdiri dari BP3TKI Jawa Barat, BPTKIT sebagai bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Tenaga profesional, inspirator dan motivator. Materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi kewirausahaan ini meliputi pemberdayaan TKI, pola berusaha, kredit usaha kecil untuk TKI purna, serta mutu kualitas produk dan pengembangan usaha. Secara konsep, pemberdayaan ini melakukan konsep inkubasi dan terdiri dari lima tahap. Di antaranya TKI purna dilatih, diajak berproduksi, didampingi, dan dicarikan penjamin dari pembiayaan (produksi pasca pelatihan) dan penjualan hasil produksi. Pemberdayaan TKI purna sangat dibutuhkan apalagi setelah adanya

moratorium pemberangkatan tenaga kerja ke negara-negara Timur Tengah, sementara sebagian besar TKI khususnya dari Jawa Barat adalah TKI yang pernah bekerja di Timur Tengah sehingga perlu adanya bimbingan dan pelatihan bagi TKI yang pulang dan tidak lagi bekerja ke Timur Tengah. TKI yang telah kembali ke kampung halamannya perlu untuk melanjutkan kehidupannya. Jika mereka tidak diberdayakan maka akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, kesejahteraan kehidupan masyarakat semakin berkurang karena tidak adanya sumber dana yang menyokong kehidupannya.

Tujuan utama kegiatan kewirausahaan ini supaya TKI dan keluarga TKI dapat mengelola keuangan untuk pengembangan usaha-usaha yang produktif bagi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Meski hambatan tetap tidak terhindarkan seperti masih sporadisnya dan belum terintegrasinya program pemberdayaan TKI purna. Hal inilah yang pada akhirnya membuat para peserta pelatihan yaitu TKI purna merasa bingung karena di sisi lain instansi pemerintah memiliki program pemberdayaan, di sisi lain perbankan dan pelaku pengusaha juga memiliki program yang serupa. Walau begitu, tujuannya tetap sama yaitu demi memberdayakan para TKI purna. Namun memang perlu diperhatikan berbagai pihak yang terlibat bahwa pengintegrasian data

dan pengawasan program ini adalah sebuah keharusan, karena akan menyulitkan pihak terkait untuk mengondisikan dan mengelola program karena data dan pengawasannya belum tertata dengan rapi dan sistematis. Hambatan lainnya seperti masalah modal juga menjadi “PR” bagi *stakeholder* dalam suksesi pemberdayaan TKI purna, dengan catatan masih dapat disiasati dengan mengikuti beragam program bantuan dengan cekatan. Adapun hambatan terakhir yang dirasakan peserta pelatihan adanya kesulitan dalam memasarkan hasil produksi, dengan rekomendasi memanfaatkan pelatihan sebagai sarana membagi ilmu pemasaran dan membuat jejaring sehingga bisa menciptakan pangsa pasar yang luas. Tentu hal ini bisa dilakukan dengan binaan dan arahan dari BP3TKI dalam penelitian ini BP3TKI Provinsi Jawa Barat.

Membuat kebijakan tertulis serta agenda rutin berkesinambungan yang memiliki dasar hukum undang-undang, dapat menjadi alternatif penguatan kegiatan edukasi TKI purna. Setelah kebijakan diperkuat, lalu dikomunikasikan dengan terarah secara baik kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi pun dapat berjalan sesuai harapan. Dengan demikian, bukan hanya di Kabupaten Garut, tetapi TKI purna di daerah lain pun bisa ikut diberi pembekalan dan ke depannya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H., & Saputra, Y. E. (2016). Analisis tingkat literasi keuangan. *Jebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 235–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v1i2.37>
- Astuti, I. Y., Niam, M. A., & Handayani, T. (2019). Strategi entrepreneurhsip dalam pemberdayaan TKI purna mandiri melalui pengembangan ekonomi lokal di Desa Bedali Kabupaten Kediri. *Conference on Research & Community Services*, 873–880.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: risalah tentang sosiologi pengetahuan*. LP3ES.
- Bungin, B. (2003). *Analisis data penelitian kualitatif*. Grafindo Persada.
- Hanidah, I.-I., Mulyono, A. T., Moody, S. D., Apriliani, R. D., & Setiasih, I. S. (2018). Pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kreatif di pesisir Pantai Cimalaya - Subang Jawa Barat. *Agricore Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Unpad*, 3(2), 491–496. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/agricore.v3i2.15480>
- Hikmah, R. L., Sukmayeti, E., & Utami, V. Y. (2019). Peran konsultasi BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dilema Birokrasi dalam Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 2116–2226.
- Katiah, Dahliana, A., & Karmila, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui desa fashion di Desa Kali Tengah. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2(1), 699–707.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, J. (2016). Kandungan karbohidrat dan protein jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) pada media tanam serbuk kayu kemiri (*Aleurites moluccana*) dan serbuk kayu campuran. *Jurnal Eksakta*, 1(1), 38–41.
- Purwana, D. (2016). Pelatihan berwirausaha edit dan video shooting dan event organizer bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) purna di Sukabumi Jawa Barat. *SARWAHITA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(1), 49–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/sarwahita.131.08>
- Savitri, A. S. N., Umar, A. U. A. Al, Fitriani, A., Mustofa, M. T. L., & Arinta, Y. N. (2020). Dampak dan strategi usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi dan era new normal. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1433–1437.
- SE, G. C. (2019). Analisis terhadap minat kerja TKI purna di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2), 1–21.
- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(3), 208–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1786>
- Setyadi, A. (2015). *BNP2TKI bina TKI purna untuk berwirausaha*. Okezone.
- Syahmat, M. Z., & Jumaah, S. H. (2020). Analisis dampak program “Desa TKI” dalam mengatasi permasalahan TKI (studi pada Desa Jenggik Utara Kota Lombok Timur). *Jurnal Education and Development*, 8(4), 64–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i4.2054>
- Witono, N. B. (2021). Kebijakan perlindungan

- pekerja migran Indonesia dalam pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Ketenagakerjaan*, 1(2), 42–59.
- Yuniar, A., Rohanda, & Perdana, F. (2021). Komunikasi intruksional volunteer pengajar Komunitas 1000 Guru Bandung pada aktivitas literasi TNT #18. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 1(1), 67–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/inf.v1i1.31583>